

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Peneliti menggunakan Jawa Barat sebagai objek penelitian. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai potensi daerah yang dapat diberdayakan misalnya menyangkut sumber daya air, sumber daya alam, sumber daya hutan, dan sumber daya perkonomian. Jawa Barat secara teritorial wilayah berada di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Banten dan DKI Jakarta, wilayah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, wilayah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, serta wilayah barat berbatasan dengan Selat Sunda. (www.jabarprov.go.id)

Tabel 1.1 menampilkan Perbandingan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 dan 2018.

Tabel 1. 1
Perbandingan Rasio PAD antar Provinsi

NO.	PAD 2017	PAD 2018
1.	Dki Jakarta	Dki Jakarta
2.	Kalimantan Selatan	Banten
3.	Banten	Kalimantan Selatan
4.	Jawa Barat	Bali
5.	Jawa Timur	Jawa Barat

Sumber : DJPK, Kemenkeu RI (diolah tahun 2018)

Pada gambar perbandingan rasio PAD antar Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 dan 2018 menduduki posisi di atas rata-rata keseluruhan sebesar 33,9% pada tahun 2017 dan 35,2% pada tahun 2018. Pada tahun 2017 dan 2018 Jawa Barat mengalami penurunan rasio PAD yang sama dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat pada tahun

2017 dan 2018 memiliki dana perimbangan yang cukup tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 1. 2

Perbandingan Rasio Dana Perimbangan pada Sepuluh Provinsi di Indonesia

NO.	DAPER 2017	%	DAPER 2018	%
1.	Aceh	26,2%	Aceh	26,4%
2.	DKI Jakarta	30,0%	DKI Jakarta	32,4%
3.	Papua	31,6%	Papua	33,6%
4.	Kalimantan Selatan	41,1%	Papua Barat	39,4%
5.	Banten	42,1%	Banten	40,3%
6.	Bali	43,0%	Kalimantan Selatan	41,9%
7.	Jawa Barat	43,0%	Bali	43,2%
8.	Papua Barat	46,4%	Jawa Barat	44,9%
9.	Jawa Timur	46,6%	Jawa Timur	45,7%
10.	Jawa Tengah	48,6%	Sumatera Selatan	46,2%

Sumber : DJPK, Kemenkeu RI (diolah tahun 2018)

Perbandingan PAD terhadap total pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah dibandingkan dengan pendapaatn yang berasal dari dana perimbangan atau APBN. Ketika dana perimbangan tinggi maka meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang kemudian mengakibatkan tidak adanya kemandirian di suatu daerah yang akan berdampak kepada kinerja pemerintah daerah. Pada tabel di atas menunjukkan Jawa Barat memiliki dana perimbangan yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kalimantan Selatan yang juga mengalami penurunan rasio PAD di tahun 2017 dan 2018.

Untuk itu, penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk periode tahun 2015 hingga tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rentang waktu selama tiga tahun terakhir sehingga informasi yang

dihasilkan relevan dan mendekati dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi di pemerintahan tersebut.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dan penggunaannya harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Undang-Undang No.32 tahun 2014 menjadi landasan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dalam hakikatnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada perundang-undangan, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam APBD sendiri terdapat tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Sutojo (2015) masih banyak permasalahan otonomi seperti pemekaran daerah yang belum mampu untuk mandiri. Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kinerja daerahnya. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat menggunakan rasio-rasio keuangan. Menurut Putra (2018 : 61) terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, rasio *debt service coverage*, dan rasio pertumbuhan. Pada penelitian ini penulis menggunakan rasio derajat

desentralisasi untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio derajat desentralisasi menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

Dalam artikel Tagar.Id yang dimuat tanggal 28 Mei 2019 (www.tagar.id) , Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018 Provinsi Jawa Barat, namun tata kelola keuangan masih ada persoalan. Permasalahan tersebut terkait dengan pengelolaan kas. BPK melihat dalam LKPD ada ketidakpatuhan dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai di tengah-tengah dorongan pemprov Jawa Barat untuk melakukan transaksi non tunai. Kenyataannya masih ada beberapa OPD yang melakukan transaksi tunai dalam melaksanakan kegiatannya. Dampaknya, tentu lebih meningkatkan risiko penyimpangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti soal pelaksanaan anggaran berupa pekerjaan belanja modal untuk proyek jalan nasional. BPK melihat mulai dari perencanaan, persiapan pelaksanaan hingga proses pelaksanaannya bermasalah sehingga menimbulkan kerugian. Kemudian, BPK melihat adanya temuan soal aset. Pengelolaan aset memang jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tetap saja dalam LKPD 2018 BPK masih menemukan masalah. Seperti penilaian, keberadaan aset hingga penyajian data dalam laporan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan permasalahan terkait dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). BPK menemukan adanya pelanggaran sampai mengakibatkan kekurangan kas, artinya ada permasalahan administrasi. Termasuk permasalahan dengan aset di sekolah-sekolah. BPK menemukan adanya pemberian barang hibah dari pemerintah pusat yang tanpa diberitahukan kepada Pemprov Jawa Barat. Sehingga tidak tercatat sebagai aset.

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun hasil Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (LKPD) sudah menghasilkan Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil opini tersebut mencerminkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Jawa Barat sudah dikatakan baik. Akan tetapi, tidak selamanya WTP berbanding lurus dengan suatu kinerja keuangan pemerintah. Hasil opini WTP yang didapatkan pemerintah tidak menjamin kinerja keuangan lebih bagus dari pada saat daerah tersebut mendapatkan opini non-WTP. Menurut Ara (2016) besar jumlah temuan audit pada suatu daerah maka akan semakin rendah kinerja pemerintah daerah. Fenomena tersebut juga memiliki beberapa temuan audit yang menjadi permasalahan hal ini membuat Jawa Barat belum memiliki kinerja keuangan yang baik.

Menurut Putra (2018 : 150) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan PAD diharapkan pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan dalam penyelenggaraan urusan daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat, sehingga semakin tinggi penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintah daerah yang nantinya akan berdampak kepada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah juga megemukakan perbedaan hasil. Hasil penelitian yang dilakukan Tarmizi, Khairudin, dan Fransisca (2015) , Sari, Tjahjono, dan Turino (2018), Eka dan Nugraha (2018) PAD memiliki pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putri dan Darmayanti (2019) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana

perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembagian dana perimbangan yang tidak merata akan berdampak terhadap ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga membuat pemerintah daerah tidak mandiri dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah pada daerah tersebut.

Menurut Anggreni dan Artini (2019), Alfarisi (2015), Tarmizi, Khairudin, dan Fransisca (2015) dana perimbangan memiliki berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini berbeda dengan Malau, Erlina, dan Sirojuzilam (2019) Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kurniawati, Busaini, dan Pancawati (2017) Dana Perimbangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat.

Ukuran pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktifitas. Hal ini akan menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah maka akan semakin besar peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah daerah, karena semakin besar ukuran pemerintah dapat memberikan kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu juga sebaliknya.

Menurut Saraswati dan Rioni (2019) ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis kedua ditolak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016), Kiswanto dan Fatmawati (2019) ukuran pemerintah berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018).”

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, kinerja keuangan dilakukan untuk menilai suatu kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi pemerintah untuk merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur keuangan pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Analisis rasio dapat digunakan sebagai alat pengukuran kinerja pemerintah hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang didapatkan dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga nantinya dapat mengetahui kecenderungan yang terjadi dalam pemerintah daerah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan rasio derajat desentralisasi untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio derajat desentralisasi menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan dan terdapat hasil yang inkonsisten dalam penelitian terdahulu, maka peneliti akan menguji kinerja keuangan pemerintah daerah daerah berdasarkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018 secara simultan?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah :
 - a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018?
 - b. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018?
 - c. Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah :
 - a. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018.

- b. Untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018.
- c. Untuk mengetahui apakah Ukuran Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih kreatif dan inovatif.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan tambahan ilmu pengetahuan dalam pengembangan teori dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.6 Sistematis Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan terdiri atas lima bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian yang diambil dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018. Latar belakang penelitian yang berkaitan dengan fenomena dari objek penelitian sehingga layak untuk diteliti sesuai dengan teori-teori yang ada. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian terkait masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang secara teoritis dan praktis, serta sistematis penulisan tugas akhir secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab II merupakan penjelasan mengenai landasan teori yang terkait pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Pada bab II juga membahas persamaan dan perbedaan variabel independen. Kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran akan disusun hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, variabel operasional yang digunakan, tahapan penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data, dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan atas pertanyaan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.